

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Pergeseran paradigma calon perseorangan pasca reformasi terjadi disebabkan; diperbolehkannya calon perseorangan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengujian sebagaimana dimaksud disebabkan dalam undang – undang tersebut hanya memberikan kesempatan terhadap partai politik dalam pemilihan kepala daerah sehingga, keinginan perseorangan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah terabaikan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian memunculkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan bagi calon perseorangan melalui Pasal 59 (UU No. 12 Tahun 2008).
2. Adapun kendala - kendala yang dialami oleh calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah 9 Desember 2015 dibagi menjadi dua macam yaitu; *Pertama*, mengenai Jumlah Dukungan yang semakin naik dari 6,5% (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015) menjadi 10% (Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015) sehingga, memberatkan bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. *Kedua*, Kendala akumulasi jumlah suara. Kendala sebagaimana dimaksud disebabkan, akumulasi jumlah suara yang di bebaskan terhadap calon perseorangan lebih berat daripada calon yang diusulkan partai politik. Akumulasi jumlah suara calon yang diusulkan oleh partai politik dihitung dari perolehan suara

pemilihan legislatif yang menggunakan dana negara, sedangkan akumulasi jumlah suara untuk calon perseorangan dihitung pada saat pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan serta dana yang digunakan menggunakan dana pribadi.

3. Konsep Ideal untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015, menggunakan "pola koordinatif". Model sebagaimana dimaksud adalah, "pola koordinasi". pola koordinasi sebagaimana dimaksud, dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu; *pertama*, koordinasi internal, yaitu koordinasi antara KPU dengan KPUD. *Kedua*, Kemudian koordinasi penunjang dengan Bawaslu, DKPP dan Pemerintah. *Ketiga*, koordinasi final, yaitu koordinasi yang dilakukan dengan MK dan PT TUN.

B. Saran

Dari uraian sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka, saran penulis untuk ketiga rumusan masalah adalah sebagai berikut; *pertama*, mengenai pergeseran paradigma calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah pasca reformasi. Untuk memastikan tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap setiap warga negara yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah maka, dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang harus menjunjung tinggi prinsip – prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar NRI 1945. Perlakuan sebagaimana dimaksud, selain untuk menjamin hak politik bagi setiap warga negara juga untuk menghindari adanya gejolak dari masyarakat setiap akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah.

Kedua, mengenai kendala – kendala dalam pemilihan kepala daerah. Agar tidak terjadi kendala dalam pencalonan bagi calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah selanjutnya atau yang akan datang, maka perlu ada

perbaikan ketentuan mengenai peran serta calon perseorangan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015. Perbaikan sebagaimana dimaksud adalah; a) jumlah dukungan bagi calon perseorangan dikurangi menjadi 3% sebagaimana yang berlaku di daerah Aceh. Pengurangan tersebut untuk mempermudah bagi calon perseorangan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, serta agar tidak terjadi dualisme pengaturan yang berbeda antara ketentuan yang berlaku di daerah Aceh dan yang berlaku diluar Aceh. b) Perlu ada perbaikan konsep pembiayaan bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, konsep sebagaimana dimaksud disebabkan sumber dana partai politik yang kemudian mengusung calon tertentu bersumber dari APBN/APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota. Dengan demikian, partai politik yang sumber dananya berasal dari dana Negara dan calon perseorangan berasal dari dana pribadi, ketentuan tersebut bersifat diskriminatif sehingga hanya memberatkan calon perseorangan.

Ketiga, mengenai konsep ideal dalam pemilihan kepala daerah. Konsep yang ideal dalam pemilihan kepala daerah selanjutnya atau yang akan diselenggarakan pada Tahun 2017 dan seterusnya, lebih mengedepankan ”model koordinatif”. Model koordinatif sebagaimana dimaksud, tentu perlu diatur terlebih dahulu dalam undang – undang pemilihan kepala daerah. Model tersebut, selain untuk menghindari putusan yang berseberangan antara KPU RI dengan KPUD, serta untuk menghindari putusan yang berseberangan dengan lembaga – lembaga pendukung lainnya (Bawaslu, DKPP, Pemerintah, MK, dan PT TUN).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukthie Fadjar. 2008. Dalam *"Sang Penggembala: Perjalanan Hidup dan Pemikiran Hukum A. Mukthie Fadjar. (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008)"*. Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- _____. 2013. *"Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah & Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis"*. Setara Press. Malang
- Ade Irawan, dkk. 2012. *"Korupsi Pemilu"*. Diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Jakarta
- _____. 2014. *"Panduan Korupsi Pemilu"*. Diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Jakarta
- Afan Gaffar. 1989. Kata Pengantar Pembangunan Politik di Dalam Ilmu Politik. dalam *"Beberapa Aspek Pembangunan Politik: Sebuah Bunga Rampai"*. (diterjemahkan oleh Drs. Sahat Simamora). Penerbit CV. Rajawali. Jakarta
- _____. 1999. *"Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi"*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Alfian. 1981. *"Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia"*. (Kumpulan karangan). Penerbit PT Gramedia. Jakarta
- Any Rohyati, dkk. 2006. *"Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal"*. Penerbit Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY. Yogyakarta
- Arbi Sanit. 1985. *"Perwakilan Politik di Indonesia"*. Penerbit CV. Rajawali Press. Jakarta
- J. Heidenheimer, Arnold, dkk. 1993. *"Korupsi Politik"*. (Penyunting; Mochtar Lubis dan James C. Scott). Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Artidjo Alkostar. 2008. *"Korupsi Politik Di Negara Modern"*. FH UII Press. Yogyakarta
- Bagir Manan. 1994. *"Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945"*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Russell, Bertrand. 1953. *"Kekuasaan dan Individu"*. (terjemahan Kamaruzzaman). Penerbit Jajasan Pembangunan. Jakarta
- Kortmann, C.A.J.M.. 1983. *"De Grondwetsherziening 1983"*. Kluwer-Deventer
- Dhurudin Mashad, dkk. 2005. *"Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah"*. Diterbitkan atas kerjasama Pustaka Pelajar-Yogyakarta dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI-Jakarta

- Nohlen, Dieter.1994. "*Kamus Dunia Ketiga*".(terjemahan Titi Soentoro, dkk).Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Donny Gahral Adian.2010. "*Demokrasi Substansial Risalah Kebangkrutan Liberalisme*".Penerbit Koekoesan. Cetakan Pertama. Jakarta
- Suseno, Franz Magnis.2001. "Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern".Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.Jakarta
- Gamawan Fauzi. Dalam, "Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia."Konstitusi Press.Jakarta
- Sorensen, Georg.2003. "*Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*".(Alih Bahasa; I Made Krisna).Penerbit Pustaka Pelajar dan Perum Dayu Permai. Yogyakarta
- Sahdan, Gregorius, dkk.2009. "Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia".Penerbit The Indonesian Power for Democracy (IPD).Yogyakarta
- Ibnu Tricahyo.2009. "*Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*".In-TRANS Publishing.Malang
- I Dewa Gede Atmadja.2011. "*Demokrasi, HAM, & Konstitusi*".Setara Press. Malang
- _____.2012. "*Ilmu Negara; Sejarah Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*".Setara Press. Malang
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari.2011. "Dasar-Dasar Politik Hukum".PT.RajaGrafindo Persada.Cetakan ke-7.Jakarta
- Irmanputra Sidin. Dalam "*Otonomi Daerah Evaluasi & Proyeksi*".(kumpulan tulisan).Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.2003.Jakarta
- Widyoko, J. Danang.2013. "*Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia: Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik*".Setara Press.Malang
- Wajong, J.1973. "*Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*".Penerbit Djambatan. Jakarta
- Simorangkir, J.C.T.1985. "*Beberapa Karya Lepas Mengenai: Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan, Partisipasi Kristen dalam Pembangunan Politik, Menyongsong Pemilu Tahun 1987, 39 Tahun DPR-RI Dalam Sorotan Hukum, Aspek Hak Cipta di Indonesia*".Penerbit Kesaint Blanc.Jakarta
- Von Schmid, J.J.1962. "*Ahli-ahli Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum*".(terjemahan; Mr. R. Wiranto).PT. Pembangunan. Jakarta
- Bentham, Jeremy.2010. "*Teori Perundang-undangan*".(terjemahan Nurhadi, M.A.)Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia. Bandung

Jimly asshiddiqie.2014. "*Perihal Undang-Undang*".PT Rajagrafindo Persada. Jakarta

_____. Makalah disampaikan pada Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta. Februari 2013

Laode Ida, dkk. "*Otonomi Daerah Evaluasi & Proyeksi*".(kumpulan tulisan).Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.2003. Jakarta

Leo Agustino.2009. "*Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*".Pustaka Pelajar.Yogyakarta

_____.2014. "*Politik Lokal dan Otonomi Daerah*".Alfabeta. Bandung

M. Hutauruk.1983. "*Azas-azas Ilmu Negara*".Cetakan ke-3 (edisi revisi).Penerbit Erlangga. Jakarta

M. Mahrus Ali, dkk."Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif."Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.2011

Iver, Mac.1988. "*Negara Modern*".(terjemahan; Drs. Moertono).Penerbit Aksara Baru. Jakarta

Maria Farida Indrati S.2007. "*Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*".Penerbit Kanisius.Buku 1. Yogyakarta

d'Entèves, Maurizio Passerin.2003. "*Filsafat Politik Hannah Arendt*".(Alih bahasa; M. Shafwan).Penerbit Qalam.Yogyakarta

Miriam Budiarto.2008. "*Dasar-dasar Ilmu Politik*".Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Edisi Revisi. Jakarta

Moh. Mahfud MD.2011. "*Politik Hukum di Indonesia*".Rajawali Pers.Cetakan ke-4.Jakarta

_____, *Evaluasi Pemilu dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum*, dalam Anonim (2012), "*Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilu di Indonesia*." Jakarta.Konstitusi Press

Mohammad Hatta.1975. *Kearifan Indonesia Merdeka*. Dalam "*Masalah Kenegaraan*".(kumpulan tulisan).Penerbit PT Gramedia. Jakarta

Muhammad Najib, dkk.2006. "*Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*".Penerbit Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY.Yogyakarta

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002. Buku V Pemilihan Umum".Edisi Revisi.Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010

Ni'matul Huda.2013. "*Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*".Pustaka Pelajar.Yogyakarta.Cetakan ke-III

- _____.2014."Desentralisasi Asimetris dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus".Penerbit Nusa Media Bandung
- Noor M. Aziz.2011."Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah".Diterbitkan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki.2014."Penelitian Hukum".Penerbit Prenadamedia Group.Cetakan ke 9. Jakarta
- Kothari, Rajni.*Isu-Isu dalam Pemerintahan yang Terdesentralisasi*. Dalam Abdul Aziz dan David D. Arnold.2003."Desentralisasi Pemerintahan Pengalaman Negara-Negara Asia."Diterbitkan oleh Pondok Edukasi.Yogyakarta
- Ramlan Surbakti.2010."Memahami Ilmu Politik".Grasindo.Jakarta
- Saldi Isra.2010."Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia".PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Huntington, Samuel P.1983."Tertib Politik di Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah".(terjemahan penerbit).Penerbit CV. Rajawali.Jakarta.Buku II
- van de Maat, Sanne."Vergelijkende case studie naar politieke corruptie in Nederland als maatschappelijk probleem".23 juni 2014.Universiteit Twente
- Soehino.2005."Ilmu Negara".Penerbit Liberty. Yogyakarta
- Soetandyo Wignjosebroto.2013."Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum".Setara Press. Malang
- Wirjono Prodjodikoro.1980."Azas-Azas Hukum Tatanegara di Indonesia".Penerbit Dian Rakyat. Jakarta

PUTUSAN, JURNAL, MAJALAH

- Putusan Nomor 006/PUU-III/2005;
- Putusan Nomor 5/PUU-V//2007
- Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010
- Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2015
- Perkara Nomor 60/PUU-XIII/2015
- Putusan Nomor 5/PUU-V/2007.

Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015

Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015

Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015

Jurnal Ilmu Sosial Transformatif. No. V Tahun 2000

Jurnal Pemilu & Demokrasi. Edisi 4. November 2012

Majalah Parlementaria. Edisi 126 TH. XLV, 2015

Majalah Suara KPU. Edisi IV, Juli – Agustus 2015

Majalah Suara KPU, Edisi III, Mei-Juni 2015

INTERNET

<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/06/22204111/Sebanyak.256.Pasang.Calon.Perseorangan.Daftar.Pilkada.Serentak>. Diunduh 23 agustus 2015

<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/06/22204111/Sebanyak.256.Pasang.Calon.Perseorangan.Daftar.Pilkada.Serentak>. diunduh 23 Agustus 2015

<http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4620/KPU-Tunda-Pelaksanaan-Pilkada-di-5-Daerah>. diunduh 9 Desember 2015

<http://infopilkada.kpu.go.id/index.php?r=dashboard/paslon&tahap=3>. diunduh 5 Desember 2015

<http://infopilkada.kpu.go.id/index.php?r=dashboard/paslon&tahap=3>. diunduh 9 Desember 2015

MEDIA

Kompas,, Sabtu, 26 September 2015

Kompas, Selasa, 29 September 2015

Kompas, Rabu, 30 September 2015

Kompas, Rabu, 7 Oktober 2015

Kompas, Kamis, 8 Oktober 2015

Kompas, Sabtu 24 Oktober 2015

Kompas, Minggu, 25 Oktober 2015

Kompas, Senin 26 Oktober 2015

Kompas, Selasa, 27 Oktober 2015

Kompas, Rabu, 28 Oktober 2015

Kompas, Jumat, 30 Oktober 2015

Kompas, Kamis, 19 November 2015

Kompas, Jumat, 20 November 2015

Kompas, Selasa, 24 November 2015

Kompas, Jumat, 27 November 2015

Kompas, Sabtu, 28 November 2015

Kompas, Rabu, 2 Desember 2015

Kompas, Kamis, 3 Desember 2015

Kompas, Jumat, 4 Desember 2015

Kompas, Selasa, 15 Desember 2015

Kompas, Kamis, 31 Desember 2015

Kompas, Senin, 4 Januari 2015

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Undang - Undang Nomor. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62)

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057)

